

Implementasi Pemerintahan Digital Pada Sistem Penilaian Kinerja Secara Elektronik (E-Sikap) Organisasi Perangkat Daerah

Sapto Setyo Nugroho¹, Fajar Alan Syahrier², Liza Trisnawati³, Luluk Elvitaria⁴

¹ Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka

² Alumni Magister Sosiologi Universitas Riau

^{3,4} Dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Abdurrah

e-mail: ¹saptosn@ecampus.ut.ac.id *²Alanfajar17@gmail.com, ³liza.trisnawati@univrab.ac.id,
⁴luluk.elvitaria@univrab.ac.id

Diterima: 28 Jan 2024
Direview: 29 Jan 2024
Diterbitkan: 29 Jan 2024

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

Abstract – Digital government has become a fundamental paradigm in the transformation of public administration, including in the context of performance appraisal of regional apparatus organizations. This study aims to describe the implementation of digital government in the electronic performance appraisal system (E-Sikap) in Regional Apparatus Organizations in Riau. This research method uses a qualitative approach. Data analysis was carried out using qualitative analysis techniques, using categorization, and interpretation. The results showed that the implementation of digital government on E-Sikap in regional apparatus organizations in Riau has had a positive impact on efficiency, transparency, and accountability in performance appraisal. The application of information and communication technology (ICT) has facilitated the electronic performance appraisal process, reduced delays and improved information accessibility for stakeholders. In this study several challenges were faced during implementation, including limited human resources, and resistance to change. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of employees, increase socialization and training activities, and address security issues in the implementation of E-Sikap.

Keywords – Electronic, Government, Digital, Performance, Employee

Abstrak – Pemerintahan digital telah menjadi suatu paradigma yang mendasar dalam transformasi administrasi publik, termasuk dalam konteks penilaian kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemerintahan digital pada sistem penilaian kinerja secara elektronik (E-Sikap) di Organisasi Perangkat Daerah di Riau. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, menggunakan kategorisasi, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemerintahan digital pada E-Sikap di organisasi perangkat daerah di Riau telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memfasilitasi proses penilaian kinerja secara elektronik, mengurangi keterlambatan dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi para pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini beberapa tantangan yang dihadapi selama implementasi, termasuk keterbatasan

sumber daya manusia, dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu perlu upaya memperkuat kapasitas pegawai, meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, serta mengatasi isu-isu keamanan dalam penerapan E-Sikap.

Kata Kunci – Elektronik, Pemerintahan, Digital, Kinerja, Pegawai

I. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih [1] sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 serta (Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003) tentang kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-Government*, mengintruksikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional dengan berpedoman pada kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*). Pemerintahan Provinsi Riau Melalui Surat Edaran Gubernur Nomor: 555/Diskominfo & PDE/90.21 tentang Pelaksanaan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada bulan November 2014, dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Secara Elektronik (e-SIKAP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pasal 4 ayat 1 ini berbunyi “*Penyusunan, Perekaman dan Pelaporan SKP secara daring melalui Aplikasi e-SIKAP wajib dilakukan oleh seluruh PNS dan CPNS kecuali bagi satuan pendidikan*”.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, maka pada tanggal 1 April 2018 Pemerintah Provinsi Riau Kebijakan ini merupakan sebuah aturan dari pemerintah yang harus di ikuti oleh siapapun. Kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat menjadi pedoman terhadap kebijakan yang telah dibuat. Namun Reformasi kebijakan yang dibangun dalam penentuan formula kebijakan menjadi titik kunci dari keberhasilan suatu program yang menjadi output dari kebijakan publik. Kemudian aspek evaluasi kebijakan publik menjadi ranah bagi aktor kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang sudah dilakukan berjalan sesuai planning atau sudahkah mereview kendala-kendala yang terjadi selama implementasi kebijakan.

E-SIKAP (Elektronik SIKAP) adalah aplikasi berbasis web (*web based*) yang berguna untuk memudahkan PNS dalam menyusun Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku kerja serta dapat memudahkan Pejabat Penilai maupun Atasan Pejabat Penilai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan penilaian terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS. Untuk mengakses e-SIKAP cukup dengan menggunakan internet browser seperti Mozilla Firefox atau Google Chrome tanpa perlu dilakukan instalasi apapun pada sisi client/user dengan cara mengetikkan alamat URL (Uniform Resource Locator). e-SIKAP memiliki fasilitas yaitu :

1. Terintegrasi dengan aplikasi SMAR
2. Single Sign In
3. Access log
4. Perubahan password

Tujuan penerapan e-SIKAP adalah untuk :

1. Peningkatan kinerja Organisasi dan PNS dan CPNS;
2. Melakukan penataan dan penyempurnaan organisasi;
3. Melakukan penilaian atas prestasi kerja organisasi dan prestasi kerja PNS dan CPNS;
4. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan CPNS;
5. Mendorong terciptanya kompetisi kerja yang sehat antar PNS dan CPNS;
6. Memudahkan untuk merekap data capaian kerja atau SKP bulanan; dan
7. Sebagai dasar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Secara umum aplikasi ini dibedakan menjadi 5 tipe pengguna.

1. ASN
2. Atasan Langsung
3. Atasan Banding (atasan pejabat penilai)
4. Tim Verifikasi
5. Admin Aplikasi

Tiap tipe pengguna memiliki hak akses berbeda terhadap suatu objek dan menu yang dibuat di aplikasi SKP Online atau e-SIKAP. Tahapan awal dari pengguna aplikasi ini dibagi menjadi 5 (lima) tahapan utama.

1. Admin Aplikasi mengaktifasi seluruh pegawai Pemerintahan Provinsi Riau agar bias mengakses aplikasi e-SIKAP dengan menggunakan username dan password masing masing.
2. Tim Verifikasi sudah ditentukan oleh BKD, dan memiliki tanggung jawab terhadap beberapa Pemerintahan Daerah. Tim Verifikasi juga harus memeriksa hak akses tiap pegawai apakah sebagai Pegawai, Atasan Langsung atau Atasan Banding
3. Pertama kali login Pegawai harus melengkapi atribut kepegawaian masing-masing (atasan langsungnya, atasan bandingnya, Jabatan dan lain-lain)
4. Setiap Atasan Langsung memiliki hak akses sebagai Pegawai begitu pula dengan atasan Banding memiliki hak akses Atasan Langsung dan Pegawai.
5. Setelah atribut kepegawaian sudah lengkap, semua Pegawai bisa langsung membuat target tahunan SKP, mengisi realisasi bulanan SKP, melakukan pelaporan tugas tambahan dan kreatifitas serta membuat penilaian perilaku.

Latar belakang penerapan aplikasi e-SIKAP harus dilakukan karena adanya pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tidak sesuai dengan beban kerja masing-masing pegawai. Selain itu penempatan jabatan yang belum didasarkan pada kompetensi diri dan kompetensi jabatan, penilaian kinerja yang dilakukan belum subjektif dan masih banyak pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan tupoksi pekerjaannya. Dengan demikian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai tidak efektif, transparan dan akuntabel sehingga membuat sistem pelayanan publik menjadi lambat, berbelit-belit dan tidak berjalan dengan maksimal. e-SIKAP juga menjadi alat bantu dalam penghitungan pemberian tunjangan kinerja pegawai. Menurut UU ASN No. 5 tahun 2014, pasal 80 ayat 3 bahwa “Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja”. Terkait dengan pemberian tunjangan kerja pegawai, sebelum diterapkan aplikasi e-SIKAP para pegawai yang bekerja dengan posisi yang sama, pemberian tunjangan kepada para pegawai yang disiplin bekerja dan yang pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja diberikan dengan jumlah yang sama. Hal ini menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial antar pegawai sehingga para pegawai yang tadinya disiplin dalam bekerja menjadi malas berkerja karena kesamaan jumlah tunjangan kerja yang diberikan. Dengan diterapkannya sistem aplikasi e-SIKAP, diharapkan pemberian tunjangan kinerja pada pegawai menjadi lebih adil, dengan posisi kerja yang sama, pegawai yang rajin bekerja dan yang malas bekerja tunjangan yang diberikan tidak lagi sama karena pemberian tunjangan dilihat berdasarkan kinerja para pegawai melalui aplikasi e-SIKAP.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Penelitian yang terdahulu oleh Arif Ilham Sirait (2019) dalam skripsinya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “Penilaian Kinerja Pegawai melalui Penerapan Sistem e-KINERJA di Badan Kepegawaian Negara Kota Banda Aceh”. Hasil dari penelitian dari Arif Ilham Sirait tersebut dilakukan dengan cara pendekatan perencanaan yang mengacu pada analisa yang dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan teknik wawancara dan survei. Wawancara yang dilakukan dengan kepala bagian masing-masing unit kerja. Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner untuk mengetahui kondisi penerapan teknologi informasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Penerapan e-Government pada kabupaten Pelalawan masih perlu dilakukan evaluasi. Untuk menerapkan e-Government yang sesuai dengan acuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kabupaten Pelalawan telah mengembangkan rencana strategis teknologi informasi. Pengembangan infrastruktur juga perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kesiapan sumber daya manusia juga akan membantu kesuksesan dalam penerapan e- Government[2].

Berikutnya yang kedua adalah Penelitian yang dilakukan oleh Rissa Oktaviana (2018) dalam skripsinya di Uin Suska Riau dengan judul “Implementasi e-Office Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau”. Hasil dari penelitian dari Rissa Oktaviana tersebut dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi e-Office pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau tidak terlaksana secara optimal dikarenakan berapa faktor yang menghambat yaitu, komunikasi yang tidak konsisten, sumber daya Informasi yang kurang jelas, dan sumber daya Wewenang atasan atau pimpinan yang tidak dimanfaatkan untuk mendukung implementasi e-Office[3].

Selanjutnya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Lydia Iswandi (2016) dalam skripsinya di Universitas Riau dengan judul “Pengembangan e-Government Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016”. Hasil dari penelitian dari Lydia Iswandi tersebut dilakukan dengan melalui wawancara langsung kepada badan, dinas ataupun orang-orang yang terlibat yang mengetahui tentang pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Provinsi Riau tahun 2016. Salah satu kesimpulan dari skripsi tersebut adalah

Penerapan e-Government yang dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi website Riau sesuai dengan Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 dalam pengembangan e-Government telah sampai pada tahap pematapan. Hal ini ditandai dengan terhubungnya setiap SKPD didalam satu server yaitu riau.go.id yang dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dan di dukung oleh komitmen Gubernur Provinsi Riau dengan diselenggarakannya soft launching e-Government pada tahun 2015 sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam implementasikan e-Government di Provinsi Riau[4].

Istilah *e-Government* berasal dari bahasa inggris yang merupakan singkatan dari *Electronic Government* yang berarti Pemerintahan Elektronik. *e-Government* merupakan terobosan baru dalam sistem birokrasi pemerintahan dimana pemanfaatan teknologi informasi lebih diunggulkan sehingga dapat memperbaiki kinerja birokrasi pemerintahan[5]. Bank Dunia mendefinisikan *e-Government* sebagai pengacuan kepada kemampuan penggunaan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan untuk mengubah relasi dengan masyarakat, kalangan bisnis dan lembaga pemerintahan lainnya[6].), “menyatakan definisi *e-Government* sebagai pemrosesan secara elektronik yang digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan, menyebarkan, atau mengumpulkan informasi sebagai fasilitas transaksi dan perizinan untuk suatu tujuan[7].” Kemudian Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) RI No.3 Tahun 2003 mengemukakan bahwa tujuan *e-Government* adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau diseluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat[8],
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional,
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga Negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara,
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah otonom.

Tujuan dari *e-Government* tersebut sangat membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, sehingga pemanfaatan dan eksplorasi teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa ditunda lagi. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini semakin menuntut pemerintah untuk dapat secepatnya beradaptasi dan menerapkan inisiatif-inisiatif konsep *e-Government* jika tidak ingin tertinggal dengan negara-negara lain dan tersingkir dari persaingan dunia[7]. Konsep *e-Government* secara teoritik dipahami sebagai upaya untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta hingga dapat menjadi lebih efisien, efektif dan transparan yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan reformasi birokrasi baik itu pembenahan kelembagaan, sumberdaya manusia dan sistem. Penggunaan TIK dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah, juga memperluas partisipasi publik[9]. Pengertian *e-Government* dalam tulisan ini mengacu kepada “*Making Sense of e-Government Implementation*” (Memahami Implementasi e-Government) yaitu Kegiatan keperintahan yang menggunakan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, bisnis, pemerintahan (termasuk didalamnya pegawai pemerintah[10]). Ada dua macam definisi tentang *e-Government* yaitu :

1. Defenisi secara sempit
e-Government secara sempit didefinisikan sebagai Kegiatan pemerintah yang berlangsung dengan menggunakan media komunikasi elektronik di semua tingkat pemerintahan, masyarakat, dan bisnis (termasuk memperoleh dan menyediakan produk dan jasa, menempatkan dan menerima pesanan serta menyediakan dan memperoleh informasi dan menyelesaikan transaksi keuangan)[11].
2. Definisi secara luas
e-Government adalah optimasi terus menerus dari pelayanan publik, partisipasi konstituen dan pemerintahan dengan mengubah hubungan internal dan eksternal melalui teknologi, internet dan media baru[12].

Definisi *e-Government* bisa beragam seperti:

1. *e-Government* adalah sebuah cara bagi pemerintah untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan Institusi demokrasi[13]
2. *e-Government* mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintah melalui internet atau media digital lainnya[14]

3. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern pada pengadministrasian negara, melalui berbagai aplikasi[15]
4. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan[16]

Di Indonesia *e-Government* itu sendiri didefinisikan hampir sama dengan negara berkembang lainnya, akan tetapi seringkali pemerintah bingung harus memulai dari mana karena minimnya SDM dan SDA, namun langkah awal harus segera ditempuh jika tidak ingin tertinggal dengan Negara lain. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government* menjadikan *e-Government* sangat layak untuk diterapkan sebagai bentuk dukungan dari pengembangan pelayanan[17].

Berikut 6 (enam) strategi pemerintah Indonesia dalam penyusunan *e-Government* :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan[15].
2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan SDM dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi[5].
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha[18] dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peran dunia usaha cenderung kepada partisipasi dalam pemanfaatan *e-Government* sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah.
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan peningkatan literasi informasi masyarakat. Artinya, literasi informasi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkannya, mengakses dan menemukan informasi, mengevaluasi informasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pematapan, dan pemanfaatan.

Untuk mengintegrasikan seluruh implementasi *e-Government* di Indonesia dibutuhkan standar dan aturan-aturan pendukung yang dapat dijadikan acuan utama dalam pengembangan *e-Government* untuk seluruh instansi. Agar standar dan panduan tersebut dapat diadaptasi oleh seluruh instansi di Pemerintah itu sendiri secara lebih sistematis dan terpadu, maka perlu diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi yang lebih terperinci dan memudahkan mengikuti tahapan-tahapan kunci yang memungkinkan hasil yang ingin dicapai dapat lebih terukur[19].

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas Implementasi Pemerintahan Digital Pada Sistem Penilaian Kinerja Secara Elektronik (E-Sikap) Organisasi Perangkat Daerah dengan lokus kajian di Riau Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang memahami secara mendalam tentang objek yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan cara wawancara yang mendalam dan terstruktur, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari lingkungan luar objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan sumber literatur sebagai sumber referensi untuk menguatkan berbagai argumentasi. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan[20], kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut[21]. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal[22], ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan[23]. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana[24]. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu

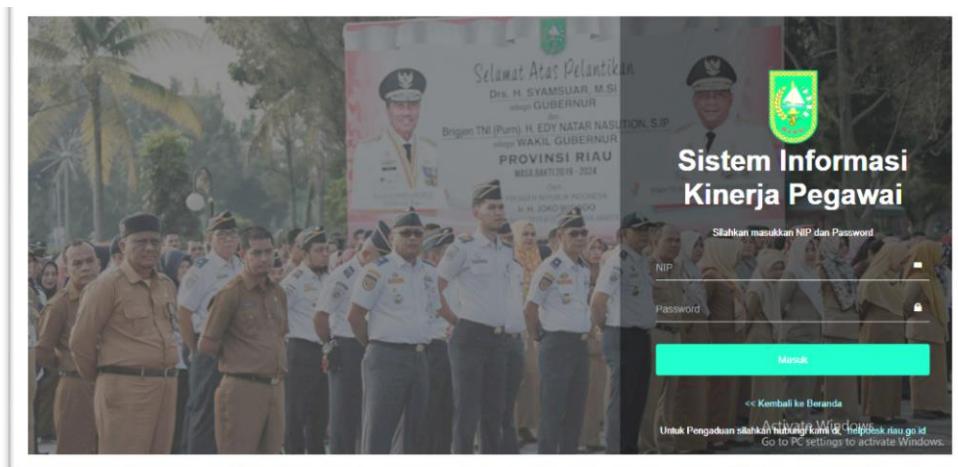
kebijakan[25]. E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan[26]. Sistem Penilaian Kinerja Aparatur secara elektronik yang selanjutnya disebut e-SIKAP adalah sistem berbasis daring (dalam jaringan) yang dapat merekam dan menyimpan data target dan capaian SKP PNS atau CPNS yang terhubung dengan basis data PNS di seluruh instansi Pemerintah Provinsi Riau. Penilaian tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran *single salary system* pegawai atau bisa dikenal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Penerapan e-SIKAP dimaksudkan untuk memudahkan penginputan dan pendokumentasian unsur prestasi kerja Perubahan yang terjadi pada kinerja PNS saat menggunakan aplikasi e-SIKAP yaitu sebelum menggunakan e-SIKAP: seluruh PNS membuat laporan SKP secara manual dan penilaiannya tidak maksimal karena atasan tidak tahu target yang di buat oleh para PNS.

Setelah menggunakan e-SIKAP: seluruh PNS membuat laporan SKP secara online dan penilaian terhadap PNS lebih maksimal karena sudah tersistem di dalam e-SIKAP sehingga lebih transparan. Perubahan perilaku PNS yang terjadi setelah diterapkannya aplikasi e-SIKAP yaitu PNS lebih disiplin dalam bekerja dan berkurangnya PNS yang duduk-duduk di warung kopi pada saat jam kerja, karena PNS dituntut untuk mengisi absensi yang ada didalam aplikasi e-SIKAP sebab perilaku kerja termasuk salah satu indikator dalam menetapkan penilaian prestasi kerja.

Dampak e-SIKAP terhadap kinerja pegawai yaitu setiap pegawai dituntut setiap hari dan bulannya untuk mengisi laporan-laporan kerja yang ada didalam sistem e-SIKAP tersebut seperti mnginput SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan, tanggung jawab dan wewenang jabatan dengan mempedomani perjanjian kerja dan mengisi laporan PKP (perilaku kerja pegawai). Namun dalam implementasinya masih terdapat kendala yang dikeluhkan oleh para PNS. Seperti rumitnya penggunaan sistem e-SIKAP. Sistem ini rumit Sebab setiap bulannya pegawai harus menginput data kinerja pegawai melalui aplikasi e-SIKAP.

Gambar 1.

Tampilan Aplikasi *e-SIKAP* Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau



Sumber : Ruang Aplikasi *e-SIKAP* Tahun 2020 (<https://skp.riau.go.id/login>)

E-SIKAP (Elektronik SIKAP) adalah aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai berbasis web (webbased) yang berguna untuk memudahkan PNS baik Pejabat Penilai maupun atasan Pejabat dalam melakukan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. software untuk mengakses aplikasi e-SIKAP yaitu penjelajah internet (browser) seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explore dan lain-lain. Untuk software Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mengalami sedikit kendala yaitu apabila terjadi maintenance server atau gangguan sistem. Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi program administrator jaringan, operator dan tenagalainnya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya harus cukup. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terlepas dengan kebutuhan sumber daya perangkat keras komputer (hardware). Pada gambar tersebut ruang antar muka atau ruang utama login aplikasi *e-SIKAP*. Pada ruang ini seluruh ASN diberikan *Username* dan *Password* untuk bisa masuk ke sistem aplikasi. Dan untuk bisa

masuk ke sistem tersebut yang mana username dan password, Pemerintah setempat bekerjasama dengan dinas terkait yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk pembuatan masing-masing akun. Sistem Penilaian Kinerja Aparatur secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-SIKAP adalah Sistem berbasis daring (dalam jaringan) yang dapat merekam dan menyimpan data target dan capaian SKP PNS atau CPNS yang terhubung dengan basis data PNS. Penerapan e-SIKAP dimaksudkan untuk memudahkan penginputan dan pendokumentasian SKP yang berujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, PNS dan CPNS serta melakukan penataan dan penyempurnaan organisasi. e-SIKAP juga bertujuan untuk melakukan penilaian atas prestasi kerja organisasi dan prestasi PNS dan CPNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan juga menjadi dasar dalam perhitungan prestasi kerja.

Hardware dalam penerapan e-SIKAP yaitu: laptop, komputer, dan Handphone. Software Sumber daya E-Government lainnya yang cukup penting adalah perangkat lunak komputer (Software). Sebagai kesediaan data masukan, baik dalam bentuk lembaran kertas maupun dalam bentuk digital (database) menjadi bahan utama proses E-Government guna mendukung tujuan penyebarluasan informasi[27]. Penilaian-penilaian yang ada di aplikasi e-SIKAP terdiri dari nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Nilai perilaku yang meliputi (orientasi pelayanan, integritas, komitmen, kerja sama, dan kepemimpinan), dan nilai prestasi kerja.

Target SKP disusun dan ditetapkan setiap awal tahun sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja, paling lambat tanggal 5 lima pada bulan Januari dan tanggal 5 setiap bulannya untuk yang bulanan. Keterlambatan pegawai mengisi target SKP akan berpengaruh pada waktu publikasi di website e-SIKAP. Untuk masalah hardware Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak mengalami kendala, karena semua PNS memiliki *handphone*, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga telah menyediakan komputer yang dapat digunakan oleh para pegawai. Efisiensi mengandung makna yaitu penerapan *Electronic Government* bertujuan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan signifikan pada kecepatan, ketepatan dan kesederhanaan layanan publik. Keuntungan-keuntungan dari pelaksanaan dan penerapan E-SIKAP adalah memudahkan untuk merekap data capaian kerja atau SKP bulanan, tanpa menggunakan kertas sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan.

Adapun penilaian indikator transparansi pada E-SIKAP adalah sudah baik karena sudah memiliki website sendiri yaitu website E-SIKAP dimana semua pegawai dan masyarakat bisa mengakses informasi dan mengetahui bagaimana penilaian kinerja yang dilakukan PNS diseluruh lingkungan Provinsi Riau. Namun dalam penyelenggaraannya website E-SIKAP masih ada yang harus dievaluasi. Berdasarkan hasil eksplorasi penelitian bahwa penggunaan sistem E-SIKAP ini masih diperlukan adanya perbaikan dan pembaharuan sistem karena masih sering terjadinya maintenance server yang dapat menghambat pelaporan kinerja pegawai dalam melakukan penginputan data kedalam aplikasi. Proses penilaian kinerja menjadi terhambat maka akuntabilitas sangat erat hubungannya terhadap nilai indikator tranparansi karena jika pemerintahan telah melaksanakan pertanggung jawaban dengan didukung sistem media yang menyediakan website-website untuk melampirkan akuntabilitas tersebut maka pemerintahan bisa dikatakan transparan dan terbuka untuk informasi tata kelolanya.

Terlihat nilai akuntabilitas di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau terhadap penerapan e-government dalam penilaian kinerja pegawai (e-SIKAP) sudah baik namun pada dasarnya karena penerapan e-SIKAP masih terbilang baru dan mengalami perubahan secara cepat sehingga PNS masih memerlukan dampingan terkhusus pada penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi yakni dari metode manual ke metode online.

Idealnya setiap kebijakan direspon dengan baik oleh para pelaksananya. Apabila para pelaksana mengimplementasikan kebijakan *e-Government* secara konsisten hal tersebut adalah sebuah respon positif dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Proses komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk perintah, arahan dan penjelasan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, pelatihan atau bentuk pertemuan lainnya. Saluran komunikasi yang digunakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau cukup memadai dan komunikasi yang dilakukan cukup tanggap dalam mananggapi pengaduan yang masuk. Pegawai yang bertugas untuk mengelola aplikasi e-SIKAP adalah orang-orang yang berkompeten dibidangnya dan pemilihan tersebut sesuai dengan SOP yang ada. Berkompeten disini berdasarkan kualifikasi pendidikan meskipun tidak semua petugas yang memiliki latar belakang informatika tetapi mereka telah diberi pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya mengelola aplikasi e-SIKAP. Adapun pencapaian terhadap nilai indikator efektivitas penerapan E-Government dalam penilaian kinerja pegawai (E-SIKAP) adalah penyediaan terhadap sarana dan prasarana oprasional yang mendukung untuk terjalannya pengelolaan pemerintahan yang baik. Hal ini terlihat dari telah disediakannya pemenuhan untuk prasarana sebagai penunjang proses penerapan e-SIKAP di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Pemerintahan yang berkapasitas dan berlandas terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sudah berjalan dengan efektif. Dan selain itu, dengan diberlakukan atau diterapkan *electronic government* dalam penilaian kinerja ini sudah membantu mempermudah pegawai pemerintah (PNS) dalam mengisi laporan sasaran kerja pegawai (SKP) secara cepat dan akurat[28]. Dalam menyongsong

kinerja pemerintahan di era New Public Service (NPS) diperlukan sebuah komitmen instansi pemerintah yang tinggi untuk tercapainya kinerja pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sangat disayangkan apabila pemerintah dalam pelaksanaan fungsi kinerjanya bersifat kaku dan tidak adaptif dengan perkembangan teknologi informasi. Disisi lain dukungan kebijakan pada setiap level pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah menekankan penggunaan IPTEK sebagai lokomotif dalam peningkatan kinerja.

Sehingga arah dan tujuan pemerintah dalam hal optimalisasi layanan publik kepada masyarakat dapat dengan mudah dicapai. Birokrasi yang progresif dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan pada institusi pemerintahan adalah cerminan birokrasi yang berkredibilitas tinggi. Sehingga stigma buruk pelayanan birokrasi pemerintah selama ini dapat dihapuskan dalam benak masyarakat. Optimisasi kinerja pegawai juga memiliki keterkaitan dengan proses penyusunan dan penyerapan anggaran kegiatan pemerintah baik itu untuk keperluan program kebijakan maupun untuk operasional belanja pegawai pada dinas dan instansi terkait. Adanya efektivitas dan efisiensi dalam penetapan anggaran ini tentunya menjadi bentuk bagian dari transparan dan akuntabel dengan adanya penggunaan aplikasi E-sikap ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian Tentang Sistem Penilaian Kinerja Secara Elektronik (E-Sikap) di Provinsi Riau Tahun 2020 bahwa sudah terlaksana dengan baik dengan beberapa tolak ukur dan parameter seperti standar dan sasaran sumber daya, karakteristik organisasi, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik. Namun demikian dalam pelaksanaan parameter standar implementasi kebijakan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya penggunaan sistem yang belum adaptif seperti adanya keluhan oleh para PNS dengan rumitnya penggunaan sistem e-SIKAP karena terbilang baru bagi pegawai sehingga PNS masih memerlukan dampingan terkhusus pada penyesuaian terhadap perubahan. Selain itu gangguan sistem (maintanance server) juga menjadi penghambat dalam pelaporan kinerja menggunakan E-Sikap. Namun masih terdapat kekurangan seperti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau sehingga para pegawai terkesan lambat dalam menjalankan sistem pelaporan Kinerja kepegawaian melalui Aplikasi E-Sikap ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemerintahan digital di tingkat daerah, khususnya dalam konteks penilaian kinerja organisasi perangkat daerah. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan yang mendukung implementasi pemerintahan digital yang lebih efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada para informan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan program e-SIKAP di Provinsi Riau yang telah banyak memberikan data dan berbagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Syamsuadi, "Membangun Demokrasi Pemerintahan di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu," *J. Din. Pemerintah.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–10, 2018.
- [2] A. I. Sirait, "Penilaian Kinerja Pegawai Melalui Penerapan Sistem E-Kinerja Di Badan Kepegawaian Negara Kota Banda Aceh." 2019.
- [3] R. Oktaviana, "Implementasi E-Office Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- [4] L. Iswandi, "Pengembangan E-Government Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2016," 2018.
- [5] S. Hartati, A. Syamsuadi, dan L. Elvitaria, "Transformasi Manajemen Universitas menggunakan Framework Cobit 5 di Era Industri 4.0," *Ganaya J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 3, no. 1, hal. 163–174, 2020.
- [6] D. Setiawan, R. N. Putri, dan A. Anggraini, "Penerapan Teknologi Seamer Kontrol Berbasis Iot Sebagai Pengontrolan Kaleng Sarden Di Desa Labuhan Tangga Hilir Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau," *J. Hilirisasi IPTEKS*, vol. 6, no. 4, hal. 481–490, 2023.
- [7] R. E. Indrajit, "Membangun aplikasi e-government," *Jakarta PT Elek Media Komputindo*, 2002.
- [8] F. A. Syahrier, "Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Pasar Kaget Di Kelurahan Tuah Karya

- Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Studi pada Pasar Kaget Riau Indah Lestari Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2014,” *J. Online Mhs. Bid. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 2, no. 1, hal. 1–11, 2015.
- [9] I. N. Trisantosa, M. T. SIP, S. I. P. Dewi Kurniasih, dan I. H. M. Hubeis, *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Deepublish, 2022.
- [10] I. F. Meutia, *Publik*. .
- [11] Z. Fang, “E-government in digital era: concept, practice, and development,” *Int. J. Comput. Internet Manag.*, vol. 10, no. 2, hal. 1–22, 2002.
- [12] A. B. Soesetyo dan K. Kasiyanto, “Kebijakan Sistem Pemerintahan E-Government di Kabupaten Tulungagung,” *JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik)*, vol. 1, no. 1, hal. 1–20, 2013.
- [13] S. N. Aprilia, A. F. Wijaya, dan S. Suryadi, “Efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah (studi pada website pemerintah daerah Kabupaten Jombang),” *Wacana J. Soc. Humanit. Stud.*, vol. 17, no. 2, hal. 126–135, 2014.
- [14] I. S. Choirunnisa, P. D. Deyani, S. P. Nurimani, dan I. Darmawan, “Implementasi E-Government Pada Aplikasi DILANDACITA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi,” *Madani J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 1, no. 11, hal. 522–530, 2023.
- [15] K. D. A. Sari dan W. A. Winarno, “Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance Di Indonesia,” *J. Ilmu Sos. dan Polit.*, vol. XI, no. 1, hal. 1–19, 2012.
- [16] J. Majid, “Kontribusi Teori Contingency: Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government Di Indonesia,” *Assets J. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 11, no. 2, hal. 186–205, 2021.
- [17] F. D. Cahyarini, “Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik,” *J. Stud. Komun. Dan Media*, vol. 25, no. 1, hal. 47–60, 2021.
- [18] D. Setiawan, L. Trisnawati, D. Arisandi, L. Elvitaria, dan I. P. Sari, “Pendampingan Model Promosi Digital Umkm Kerupuk Jangek Pak Ali Pada Masa New Normal Di Kota Pekanbaru,” *J. Pengabd. Masy. Multidisiplin*, vol. 5, no. 3, hal. 119–128, 2022.
- [19] A. Yunaningsih, D. Indah, dan F. Eryanto Septiawan, “Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi,” *Altasia J. Pariwisata Indones.*, vol. 3, no. 1, hal. 9–16, 2021.
- [20] D. Arisandi, A. Syamsuadi, dan L. Trisnawati, “Policy Brief-Model Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Teknologi Informasi Di Kabupaten Siak,” 2023.
- [21] A. Syamsuadi, D. Arisandi, S. Hartati, L. Trisnawati, L. Elvitaria, dan S. S. Nugroho, “Kebijakan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) Di Riau,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 6, hal. 8436–8450, 2023.
- [22] F. A. Syahrier, “Dinamika Kebijakan Land Conversion Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak,” *JDP (JURNAL Din. PEMERINTAHAN)*, vol. 5, no. 1, hal. 18–36, 2022.
- [23] A. Syamsuadi, S. Hartati, L. Trisnawati, dan D. Arisandi, “Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM),” *J. Inov. Ilmu Sos. dan Polit.*, vol. 2, no. 2, hal. 114–128, 2020.
- [24] A. Syamsuadi, H. Sepriyani, S. Endrini, dan A. Febriani, “EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN.” *academia.edu*, 2022.
- [25] A. C. Nur dan M. Guntur, “Analisis Kebijakan Publik,” *Makassar Publ. UNM*, 2019.
- [26] L. Trisnawati, A. Syamsuadi, D. Arisandi, L. Elvitaria, dan S. Hartati, “Strategi Peningkatan Ekonomi Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru Berbasis Digital,” *Al-Amwal*, vol. 12, no. 1, hal. 1–12, 2023.
- [27] D. Fadiyah, A. Karyana, D. Pasaribu, N. A. T. U. Hakim, S. S. Nugroho, dan L. A. Andini, “penyusunan dan pengaplikasian model desa digital berbasis tata kelola di pemerintah desa tegal kecamatan kemang kabupaten bogor,” *j. Pengabd. Masy. Bakti kita*, vol. 4, no. 1, hal. 76–90, 2023.
- [28] A. Mustanir, M. R. R. Razak, E. Koisin, M. R. Fitrianto, dan ..., *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. *books.google.com*, 2022.